

Optimalisasi Penggunaan Website Sistem Informasi Desa di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

Ahmad Musthofa¹, Cahya Lukito², Heny Suhindarno^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bojonegoro, Indonesia

*Coressponding author: hsuhindarno@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 August 2023]

Revised [10 December 2024]

Accepted [30 January 2024]

KATA KUNCI

Sistem Informasi, Desa, e-Government

KEYWORDS

Information System, Village, e-Government

This work is licensed under a



ABSTRAK

E-government tidak hanya berurusan dengan persoalan efisiensi biaya dan kecanggihan teknologi namun juga berkaitan erat dengan keterwujudan nilai-nilai yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, keterbukaan, ketepatan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Optimalisasi Penggunaan Website Sistem Informasi Desa (SID) Pada Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro (Suatu Studi di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro), peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa optimalisasi penggunaan website Sistem Informasi Desa (SID) Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro sudah dilakukan dengan cukup baik namun perlu dioptimalkan. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam mengoptimalkan penggunaan website Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro antara lain yaitu : Kurangnya sosialisasi, Sering terjadinya masalah jaringan, Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai operator serta kurangnya sumberdana untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi website SID.

ABSTRACT

E-government not only deals with issues of cost efficiency and technological sophistication but is also closely related to the realization of values that reflect good governance such as transparency, openness, policy accuracy, improving the quality of public services, and increasing community participation. From the results of research that researchers have conducted on Optimizing the Use of the Village Information System (SID) Website in the Village Government of Bojonegoro Regency (A Study in Malo District, Bojonegoro Regency), researchers can conclude that optimizing the use of the Village Information System (SID) website in the Village Government in Malo District, Bojonegoro Regency has been carried out quite well but needs to be optimized. The factors that hinder in optimization of the use of the Village Information System (SID) website of the Village Government of Bojonegoro Regency include Lack of socialization, frequent network problems, lack of qualified human resources as operators, and lack of funding sources to support the implementation of the SID website optimization.

Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mengamanatkan kepada setiap bangsa di seluruh belahan dunia untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip tidak ada yang tertinggal di belakang (*no one left behind*) (United Nation, 2015). Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada

dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.

Dalam implementasinya, Indonesia turut berpartisipasi dalam mencapai amanat TPB dengan Menyusun RPJMN 2020-2024. Hadirnya RPJMN 2020-2024 memberikan 18 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dasar pemikiran tujuan ke 18 TPB berupa “Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif” yaitu Pemerintah berupaya untuk menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dll. – Menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang (Kementerian DPDTT, 2020).

Realisasi dari upaya ini adalah dengan disahkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu program prioritas yang menjadi kewenangan desa untuk didanai menggunakan dana desa diantaranya adalah Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu fokus kegiatannya yaitu pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT, 2020).

Pada RPJMN 2020-2024 dinyatakan pula bahwa transformasi digital menjadi salah satu sasaran prioritas yang akan dicapai tahun 2024. Penyelenggaraan *E government* menjadi strategi yang diarahkan untuk diterapkan bahkan hingga ke tingkat desa. Teknologi informasi sangat mendukung proses pelayanan publik dalam mengembangkan elektronik pemerintah atau e-Government (Septian, 2021). *E-government* menawarkan manfaat dan peluang yang mengesankan di tingkat nasional, termasuk banyaknya akses yang efisien ke layanan dan pejabat pemerintah, mengurangi pengeluaran pemerintah pada fungsi administratif, peningkatan akses publik terhadap informasi anggaran, dan peningkatan akses untuk dokumentasi dan kegiatan pemerintah. Bank Dunia menekankan hal bahwa *e-government* meningkatkan peran masyarakat sipil dengan memungkinkan warga untuk berinteraksi dengan pemerintah resmi.

Pemerintah mulai untuk menyederhanakan sistem untuk membantu pekerjaannya. Hal ini memperkuat komitmen system pemerintah dalam reformasi administrasi dan keterlibatan rakyat (Erlinda, et al., 2024). Jika pelayanan publik belum mencapai digitalisasi menyebabkan prosedur manajerial non-digital dikenal memakan waktu dan proses yang rumit (Listyaningsih, 2024). Penggunaan *e-government* memberikan peluang pembangunan bagi masyarakat pedesaan dan kota dengan tingkat layanan rendah. Dari sudut pandang ekonomi, *e-government*

mengarah pada biaya informasi yang lebih rendah serta biaya pemrosesan transaksi yang lebih rendah, sehingga menghemat sumber daya manusia dan memberikan tingkat layanan yang lebih efektif yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini memberi warga fleksibilitas yang lebih besar dalam memproses transaksi pada waktu kenyamanan mereka daripada hanya selama jam kerja (Al-Hakim, 2007).

Penerapan *E government* menggunakan Sistem Informasi Desa mutlak untuk mulai diterapkan. Hal ini dikarenakan menurut Permendesa nomor 13 tahun 2020 pelaporan penyelenggaraan prioritas penggunaan dana desa adalah dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa. Di tingkat Kabupaten Bojonegoro, mengacu Pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Telah membuat *Website* untuk seluruh Desa di Kabupaten Bojonegoro dengan nama Sistem Informasi Desa (S.I.D) yang menyakup seluruh informasi yang ada di Desa Mulai Dari Info Desa, Kependudukan, Layanan Surat menyurat hingga Berita apa yang terjadi di Desa. Implementasi dari keseriusan Pemerintah dalam pembinaan SID ini adalah dengan telah didampinginya 419 desa oleh Dinkominfo Kabupaten Bojonegoro serta menjadikan 100 desa sebagai desa percontohan dalam penggunaan SID. Berdasarkan data pra penelitian di temukan bahwa SID Memiliki manfaat yang nyata dalam fasilitasi kepentingan publik seperti efisiensi waktu untuk masyarakat yang membutuhkan layanan surat menyurat,

Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki jumlah penduduk 30.654 jiwa yang terbagi dalam 20 (dua puluh) desa meliputi : Desa Dukohlor, Kacangan, Kemiri, Petak, Kliteh, Sudah, Ngujung, Tambakromo, Sumberjo, Tinawun, Banaran, Kedungrejo, Ketileng, Rendeng, Malo, Sukorejo, Trembes, Semlaran, Tanggir dan Tulungagung. Dalam pelaksanaan SID di wilayah kecamatan Malo , ditemukan bahwa SID Kecamatan Malo belum memiliki manfaat yang nyata dalam fasilitasi kepentingan publik seperti efisiensi waktu untuk masyarakat yang membutuhkan layanan surat-menyurat, arsip kependudukan yang selalu di update sehingga penerapan budaya *paperless* dalam kepengurusan administrasi pada lembaga pemerintahan khususnya untuk mencari identitas dalam pembuatan surat, tersedianya laporan penduduk bulanan yang memudahkan proses pengunduhan laporan sehingga transparansi kinerja pemerintahan meningkat.

Sistem Informasi Desa yang menjadi perwujudan *E government* memiliki banyak manfaat, namun dalam penyelenggaraannya masih menemui kendala. Kendala tersebut diantaranya tidak adanya tenaga ahli bidang Teknologi Informasi dan adanya keterbatasan akses pengetahuan, kurangnya kelengkapan data administrasi desa dalam membangun sistem informasi desa, lemahnya sumber daya manusia desa dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi desa, kurangnya perhatian masyarakat desa mengenai informasi pembangunan di desa, aplikasi sistem informasi yang diberikan kepada pemerintah desa atau yang dikembangkan di desa tidak sesuai dengan karakteristik desa. Di antara faktor

eksternal adalah ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem informasi di desa (Fauzi, 2019; Gede et al., 2021). Hal ini belum menunjukkan optimalisasi sistem yang digunakan.

Optimalisasi/optimasi yaitu proses mencari solusi yang terbaik atau nilai optimal dari permasalahan optimasi. Permasalahan-permasalahan optimasi tersebut terkadang membutuhkan pencarian nilai maksimal atau nilai minimal (Gunantara, 2018). Dengan optimasi pada sebuah sistem dapat menurunkan pembiayaan, baik pada aspek pemakaian sumber daya, berhemat dalam segala hal antara lain energi, keuangan, sumber daya alam, kerja dan lain-lain, tanpa mengurangi fungsi system tersebut. (Novia Ariyanti & Lutvi Azizah, 2019). Optimalisasi sistem informasi desa dapat dilihat dari indikator yang dibedakan menjadi 5 area pokok. Area pertama yaitu *product* yang terdiri atas kebaruan, nilai dan pengaruh penggunaan, area yang kedua yaitu proses yaitu bagaimana sebuah ide bisa diolah sesuai dengan harapan orang-orang, domain (ranah) yaitu bagaimana suatu ide, atau program membantu mendukung tujuan organisasi, *people* yaitu area indikator yang menggambarkan sifat, aspek kognitif, cara memecahkan masalah dan logika pengguna, serta yang terakhir yaitu area konteks yang mencakup kolaborasi tim dalam menyelesaikan konflik (Almeida et al., 2022).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu popularisasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memenuhi fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification* (Abdussamad, 2021).

Hasil dan Pembahasan

1. *Support* (Dukungan)

Dalam hal perencanaan penggunaan website SID Desa di kabupaten Bojonegoro sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini sebagaimana dituangkan Perbub nomor 10 tahun 2017 tentang Tata Kelola Infomasi Desa di kabupaten Bojonegoro, merupakan bentuk kesepakatan resmi penggunaan *website* dalam pelayanan publik yaitu Web Desa. Hal tersebut sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun

2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta dikuatkan melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Bojonegoro.

“Untuk penggunaan web desa ini sudah merupakan tuntutan zaman mas, dimana sekarang semua kegiatan sudah menggunakan digitalisasi. Pelaksanaan SID tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta dikuatkan melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Bojonegoro, hal tersebut merupakan keharusan bagi setiap desa di kecamatan Malo untuk memberikan pelayanan publik melalui SID atau web desa.” (Wawancara 24 Juli 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat perencanaan penggunaan website pada pelayanan publik di desa sudah menjadi ketentuan atau kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga setiap desa di wilayah kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro harus melaksanakannya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Banaran Kecamatan Malo dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut :

“ sebagai pemerintahan yang berada di tingkat paling bawah, maka kami pemerintah desa Banaran Kecamatan Malo akan berusaha untuk mendukung dan melaksanakan peraturan pemerintah seperti halnya untuk pelaksanaan web desa atau SID ini mas. Secara umum kami di desa ya masih dalam taraf belajar memberikan informasi melalui web desa ini.” (Wawancara 27 Juli 2023).

Dengan demikian perencanaan penggunaan website pada pelayanan publik di desa sudah menjadi ketentuan atau kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga setiap desa di wilayah kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro harus melaksanakannya. Terkait dengan dukungan finansial dalam rangka pelaksanaan SID di desa wilayah Kecamatan Malo, belum terpenuhinya anggaran yang memadai untuk pengelolaan data dan informasi, beberapa Pemerintah Desa (Pemdes) belum memprioritaskannya. Hal tersebut hampir sama dengan hasil penelitian yang berjudul “Optimalisasi Penggunaan Website Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru oleh Siti Khoirunisa NIM : 11770523686. Dimana terdapat permasalahan, ditemukannya banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak memahami bagaimana penggunaan website ini dikarenakan sering terjadinya masalah pada saat pengisian dan sering terjadinya

masalah website yang sering mengalami masalah sehingga masyarakat tidak dapat melakukan login untuk memasukkan data.

Apapun hasil penelitian Siti Khoirunisa adalah belum terlaksana secara optimal penggunaan website disebabkan oleh (1) kebijakan baru dengan sitem pelayanan yang berbeda membuat masyarakat tidak terbiasa (2) kurangnya sosialisasi yang dilakukan membuat masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui tentang sitem pelayanan menggunakan website sehingga membuat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan websit (3) kurangnya kemampuan sumberdaya manusia yang berkualitas membuat banyaknya masyarakat yang tidak merasa terbantu dan (4) jaringan dan server website yang sering bermasalah membuat terhambatnya proses pelayanan.

Terkait dengan SDM dalam rangka pelaksanaan SID Kepala Desa Banaran Kecamatan Malo mengatakan sebagai berikut :

“Untuk operator SID desa Banaran ini kami menugaskan Staf Desa yang dapat mengoperasikan komputer dan internet, selain itu pemerintah kabupaten juga mengadakan pelatihan untuk operator SID secara serentak di wilayah kecamatan Malo, walaupun hanya melalui *zoom meeting* mas..” (Wawancara 27 Juli 2023)

Adapun kendala yang dialami operator SID sebagaimana disampaikan oleh Operator SID Desa Petak sebagai berikut :

“Kendala kami sebagai operator SID yaitu ketersediaan data yang dapat diolah operator desa rata-rata masih dalam format tidak berstruktur, masih berbentuk hardcopy, dan pencatatan di microsoft excel belum memenuhi format data terstandar. Data harus diolah sesuai format standar, harus kontinue diupdate dan diverifikasi sehingga tercapai data dengan tingkat validitas yang baik. Oleh karena itu semua operator harus meningkatkan kemampuannya di bidang IT, dan itu perlu pelatihan lagi bagi kami sebagai operator.” (Wawancara 27 Juli 2023).

Ketersediaan sumber daya manusia atau yang memiliki kompetensi dan keahlian sangat dibutuhkan dalam pengoptimalan penggunaan website, dimana akan mempengaruhi kesuksesan penggunaan *website*. Sumberdaya manusia, penggunaan website SID Desa di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro kurang memadai karena tidak setiap desa di kecamatan Malo memiliki operator SID yang handal.

2. Capacity (Kemampuan)

Kualitas sarana teknologi, merupakan elemen penting di dalam tahap mengoptimalisasikan penggunaan website dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, dan termasuk di dalam *capacity* yang diberikan agar penggunaan website berjalan dengan

optimal. Tanpa adanya sarana teknologi yang mendukung maka tidak mungkin suatu pemerintahan secara elektronik tidak dapat tercipta. Di dalam pelaksanaan penggunaan *website* sarana teknologi yang dapat mendukung teroptimalisasikannya penggunaan website pertama adalah ketersediaan komputer, printer yang terbagi beberapa jenis baik printer serba guna maupun printer biasa, serta jaringan wifi/LAN.

Adapun sarana dan fasilitas pelayanan yang mendukung proses pelayanan administrasi kependudukan yaitu keberadaan sarana dan fasilitas pelayanan sesuai dengan fungsinya, sarana tidak hanya dilihat dari aspek penampilannya tetapi sejauhmana fungsi dan daya guna dari sarana atau fasilitas dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pada pengguna pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Malo sebagai berikut :

“Untuk fasilitas komputer atau printer rata-rata setiap desa di wilayah Kecamatan Malo sudah sangat memadai namun masalah yang sering terjadi yaitu jaringan yang sering lelet dan sering bermasalah apabila terjadinya mati lampu karena untuk website server hanya ada di dinas kominfo karna tupoksinya di daerah itu ada pada dinas kominfo, sehingga apabila terjadi masalah seperti mati lampu atau servernya mengaami kerusakan dikominfo membuat website desa ini bermasalah dan tidak bisa diakses sampai server dikominfo membaik” (wawancara 24 Juli 2023).

Hal ini didukung oleh pernyataan Operator SID Desa Rendeng yang menyampaikan: “pada saat mau mengoperasikan website Desa Rendeng untuk memasukkan data sering terjadi masalah, seperti tidak bisa login atau dibuka, sering terjadi mati lampu di kantor ini sehingga suka bermasalah apalagi semua melalui online jadi jaringan sangat diperlukan” (wawancara 27 Juli 2023)

Kutipan wawancara tersebut menggambarkan bahwa untuk kualitas sarana teknologi masih kurang memadai dikarenakan adapun sarana dalam pelayanan yang mendukung proses pengoperasian web desa yaitu keberadaan sarana yang sesuai dengan fungsinya, sarana tidak hanya dilihat dari aspek penampilannya, tetapi sejauh mana fungsi dan daya guna dari sarana tersebut dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pada pengguna pelayanan.

Jumlah sarana prasarana yang masih kurang seperti kecepatan akses jaringan internet yang sangat terbatas dikarenakan banyaknya pemakaian untuk hal lainnya, selain itu server yang berada pada dinas kominfo membuat website sering mengalami gangguan sehingga proses login sulit dilakukan. Fasilitas computer, laptop dan Wifi rata-rata setiap desa di wilayah Kecamatan Malo sudah sangat memadai namun masalah yang sering terjadi yaitu jaringan yang sering lelet dan sering bermasalah apabila terjadinya mati lampu karena untuk website server hanya ada di dinas kominfo karna tupoksinya di daerah itu ada pada dinas kominfo, sehingga apabila terjadi masalah seperti mati lampu atau servernya mengaami kerusakan dikominfo membuat website desa ini bermasalah dan tidak bisa diakses sampai server dikominfo membaik.

Kualitas sarana teknologi penggunaan website SID Desa di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro masih kurang memadai dikarenakan adapun sarana dalam

pelayanan yang mendukung proses pengoperasian web desa yaitu keberadaan sarana yang sesuai dengan fungsinya, sarana tidak hanya dilihat dari aspek penampilannya, tetapi sejauh mana fungsi dan daya guna dari sarana tersebut dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pada pengguna pelayanan.

3. Value (Nilai)

Value menjadi hal yang paling penting untuk melihat sebuah pelayanan berjalan dengan sukses atau tidak, sebab tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya konsep tersebut. Dan dalam hal ini yang menentukan besar atau tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya egovernment bukan hanya kalangan pemerintahan sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan. Optimalisasi penggunaan *Website* Sistem Informasi Desa (SID) dalam rangka mewujudkan *e government* pada Pemerintah Desa Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, sangat bermanfaat sekali karena lebih cepat dalam memberikan informasi desa kepada pihak kecamatan atau kabupaten dan dapat juga diakses atau dalam melayani masyarakat.

Penggunaan website ini memberikan manfaat dan keunggulan yang sangat besar dalam pelayanan publik di Desa wilayah Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro di antaranya adalah mudahnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak Desa. Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Desa Banaran menjelaskan:

“Penggunaan *website* ini jelas sangat bermanfaat sekali karena lebih cepat dalam memberikan informasi desa kepada pihak kecamatan atau kabupaten dan dapat juga diakses oleh masyarakat melalui hp pribadi, namun masalah yang sering terjadi dan membuat sedikit lambatnya proses pelayanan website ini adalah jaringan yang lelet dan bermasalah karena sering terjadi apabila mati lampu, dan server Dinas Kominfo Bojonegoro yang terkadang bermasalah” (wawancara 27 Juli 2023)

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan *E-government* melalui penggunaan website bisa saja terlaksana secara efektif dan efisien tetapi permasalahan dengan jaringan yang sering lelet dan server yang suka bermasalah dan alokasi anggaran untuk web desa masih minim. Akan tetapi masih ada beberapa operator atau desa yang tidak aktif dalam penyampaian informasi penggunaan *Website* Sistem Informasi Desa dalam rangka mewujudkan *e government* pada Pemerintah Desa Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, dikarenakan anggaran operasional SID yang masih minim.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Optimalisasi Penggunaan *Website* Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan *E Government* Pada Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro (Suatu Studi di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro), peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa optimalisasi penggunaan website d Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan *E Government* Pada Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan *E Government* Pada Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro sudah dilakukan dengan cukup baik namun perlu dioptimalkan.

Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam mengoptimalisasikan penggunaan website Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan *E Government* Pada Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro antara lain yaitu : Kurangnya sosialisasi, Sering terjadinya masalah jaringan, Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai operator serta kurangnya sumberdana untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi website SID. Diperlukannya sosialisasi secara optimal dan menyeluruh kepada masyarakat sehingga masyarakat mau untuk berpartisipasi dalam mendukung pemanfaatan teknologi informasi Website SID berjalan dengan optimal. Agar pemerintah desa memberikan alokasi biaya operasional web desa yang layak agar operasional website SID bisa berjalan lebih optimal. Diperlukannya adanya evaluasi terhadap kualitas Operator Web SID sehingga dapat membuat pelayanan publik dengan menggunakan website berjalan secara optimal dan dapat membuat pemahaman masyarakat menjadi meningkat. Diharapkan pihak Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Kominfo dapat meningkatkan kualitas jaringan dan mengatasi masalah server yang sering terjadi sehingga penggunaan website bisa terlaksana secara optimal.

Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar.
- Al-Hakim, L. (2007) *Global E-government : Theory, Applications And Benchmarking*. Idea Group Pub.
- Almeida, F. V., Canedo, E. D., de Oliveira Albuquerque, R., de Deus, F. E. G., Sandoval Orozco, A. L., & García Villalba, L. J. (2022) A Model for the Definition, Prioritization and Optimization of Indicators. *Electronics (Switzerland)*, 11 (6). <https://doi.org/10.3390/electronics11060967>
- Erlinda, D. F., Septian, E., & Rupiarsieh. (2024). Inovasi Aplikasi Sikepo dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(2), 1160-1169. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.607>
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16 (1), 119. <https://doi.org/10.35973/Sh.V16i1.1130>
- Gede, W., Parwita, S., Mutiarani, R. A., Nyoman, I., & Adnyana, W. (2021) *Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa Dan Kependudukan Berbasis Web Di Desa Kukuh Kerambitan*. In *Jurnal Widya Laksana* (Vol. 10, Issue 1).
- Gunantara, N. (2018). *Teknik Optimasi Analisis Kinerja Jaringan Internet Dengan Metode Class Based Queueing Di Universitas Dhyana Pura View Project Telecommunication View Project*. <https://www.researchgate.net/publication/328432697>.
- Khoirunisa, S. (2021). *Optimalisasi Penggunaan Website Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro*.
- Listyaningsih, D. M., Swasanti, I., & Septian, E. (2024). Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Terpadu Kepegawaian Pada Proses Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(1), 40-52. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JIAN/article/view/831>
- Novia Ariyanti, O., & Lutvi Azizah. (2019). Diterbitkan Oleh, N. *Buku Ajar Mata Kuliah Teknik Optimasi*.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Bojonegoro
- Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2017 tentang tata kelola informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Septian, E. (2021). Application of the Online Registration Application Service System at the General Hospital Dr. Sardjito Yogyakarta. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 5(1), 53–64. <https://doi.org/10.21787/mp.5.1.2021.53-64>



Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV.

United Nation. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development United Nations United Nations Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*.